



**TAHUN 2017**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 KEL. BONE TUA

**M A S A M B A**

## KATA PENGANTAR

**L**aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 memuat secara khusus pertanggungjawaban seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Bidang Lingkungan Hidup yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

Dalam Keterbatasan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki, Dinas Lingkungan Hidup Luwu Utara telah dapat melaksanakan kewajiban mengemban amanat pimpinan dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan hasil yang cukup baik. Oleh karena itulah, puji syukur kita panjatkan kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.,

Kami sadar bahwa LPPD ini tentunya masih ada kekurangan, olehnya itu saran dan kritik untuk kesempurnaannya sangat diharapkan.

Harapan kami, LPPD Dinas LH Luwu Utara Tahun 2017 ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala gerak langkah kita. Amien.

**Masamba, Februari 2018**

**KEPALA DINAS**

**Ir. BURAMIN DANNU**

Pkt. Pembina Utama Muda

Nip. 19600412 198903 1 010

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas LH.....	I-1
1.2 Gambaran Umum Dinas LH .....	I-1
1.2.1 Gambaran Umum Pegawai .....	I-1
1.2.2 Potensi Unggulan Internal dan Eksternal Dinas LH .....	I-5
<b>BAB II RENSTRA DINAS LH</b>	
2.1 Visi dan Misi Dinas LH .....	II-1
2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas LH .....	II-2
2.3 Indikator RPJMD .....	II-6
2.4 Prioritas Kegiatan Dinas LH .....	II-9
<b>BAB III URUSAN DESENTRALISASI</b>	
3.1 Ringkasan Urusan Desentralisasi .....	III-1
3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan .....	III-2
3.3 Anggaran Belanja dan Realisasi Pelaksanaan Urusan .....	III-3
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Potensi Unggulan Dinas LH .....	I-1
Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi I .....	II-2
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi 2 .....	II-2
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi 3 .....	II-3
Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi 4 .....	II-5
Tabel 2.5 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi 5 .....	II-5
Tabel 2.6 Indikator Kinerja RPJMD .....	II-6
Tabel 2.7 Kontribusi Indikator Dinas LH terhadap Kemajuan RPJMD ....	II-7
Tabel 2.8 Kontribusi Indikator Dinas LH terhadap Kemajuan RPJMD ....	II-8
Tabel 3.1 Sub Bidang Urusan LH Yang dilaksanakan Dinas LH .....	III-2
Tabel 3.2 Realisasi Serapan Belanja Langsung Dinas LH.....	III-4
Tabel 3.3 Realisasi Serapan anggaran Berdasarkan Program .....	III-4



#### **1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas LH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, pada Tahun 2017 Kantor Lingkungan Hidup bermetamorfosis menjadi Dinas Lingkungan Hidup dimana peraturan teknisnya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### **1.2. Gambaran Umum Dinas LH**

Dinas LH dipimpin oleh seorang Pejabat Setingkat Eselon 2 (Dua) yang memiliki tugas dan fungsi memimpin kantor dalam menyelenggarakan pembinaan dibidang :

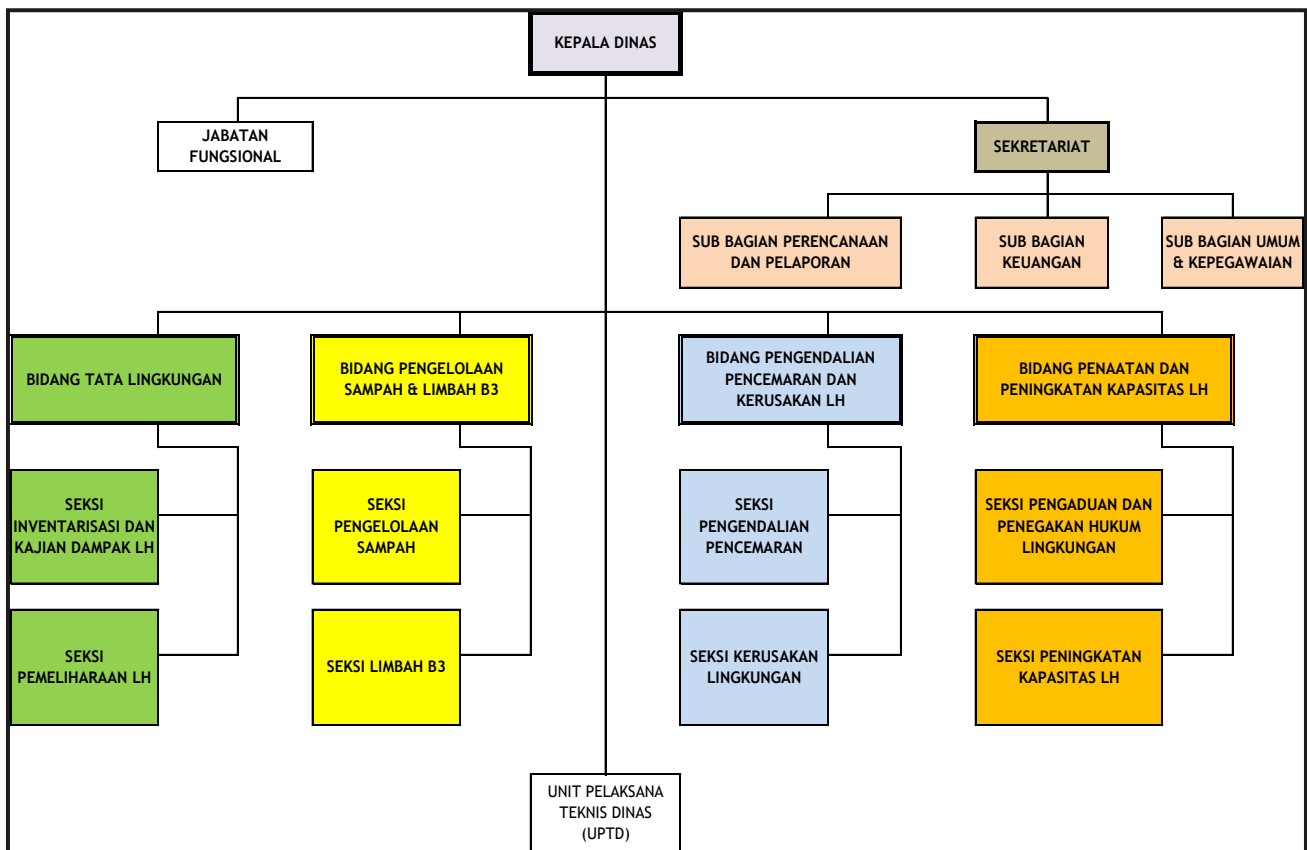
1. Tata Lingkungan
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
4. Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas dibantu oleh 5 (Lima) Pejabat Eselon 3 dan 11 Pejabat Eselon IV. Masing-masing dari pembantu tersebut adalah

1. Sekretaris yang memimpin Kesekretariatan dinas yang terdiri dari 3 Sub bagian yakni Subag Perencanaan dan Pelaporan, Subag Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian.
2. Kabid Tata Lingkungan membawahi Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak LH dan Seksi Pemeliharaan LH.
3. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Limbah B3.
4. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi seksi Pengendalian Pencemaran dan seksi Kerusakan LH.

5. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH membawahi Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Seksi Peningkatan Kapasitas LH.

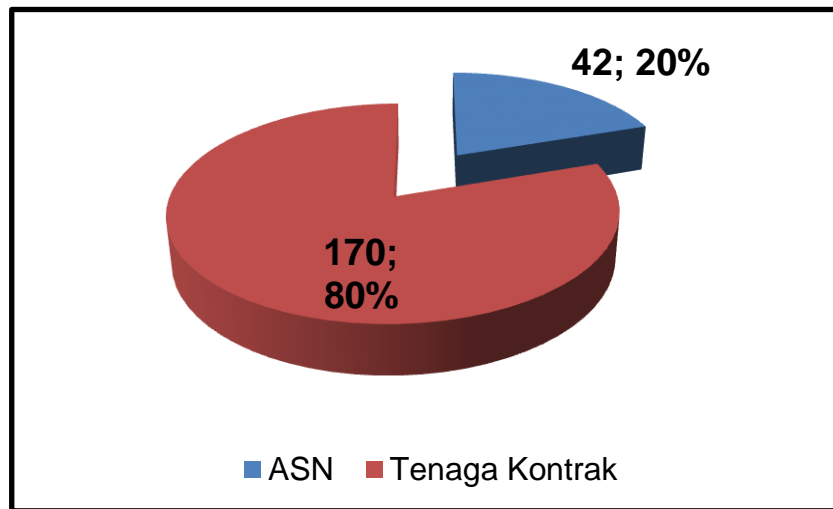
Secara teknis hierarki Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu utara disajikan pada gambar 1.



**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Dinas LH**

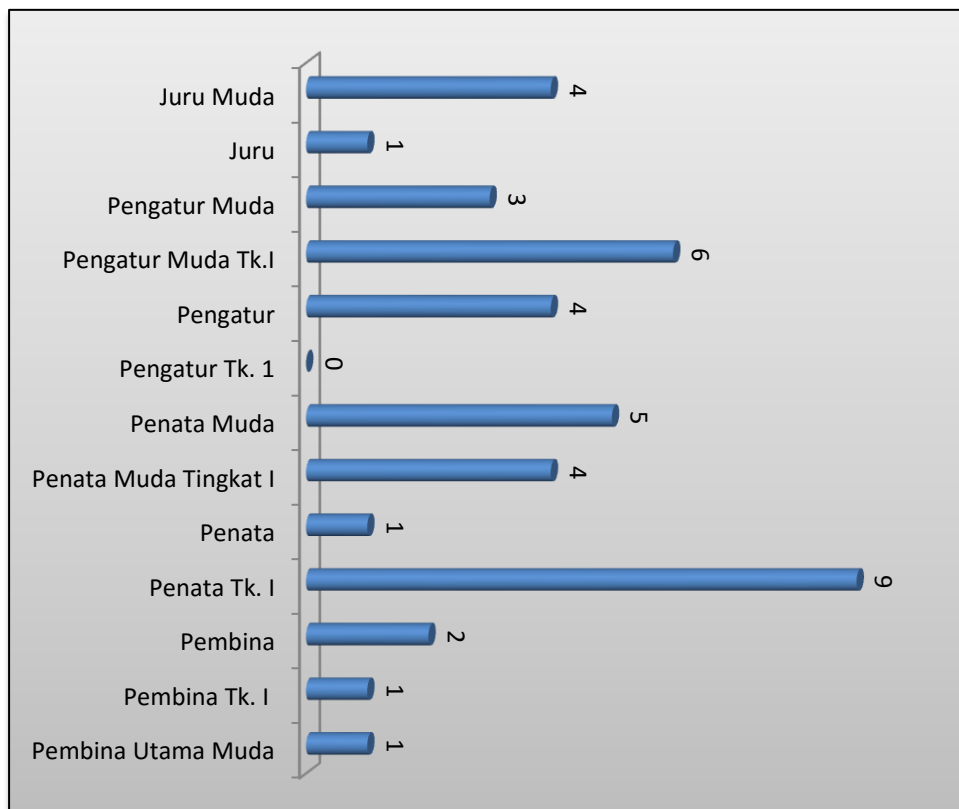
### 1.2.1. Gambaran Umum Pegawai

Ditinjau dari komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup tercatat pada Tahun 2017 Secara keseluruhan berjumlah 212 Orang yang terbagi kedalam ASN Dinas LH dan Tenaga Kontrak. Untuk ASN berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) orang sedangkan Tenaga Kontrak berjumlah 170 (Seratus Tujuh Puluh) Orang. Gambar 2. Menyajikan Porsi Jenis Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017.



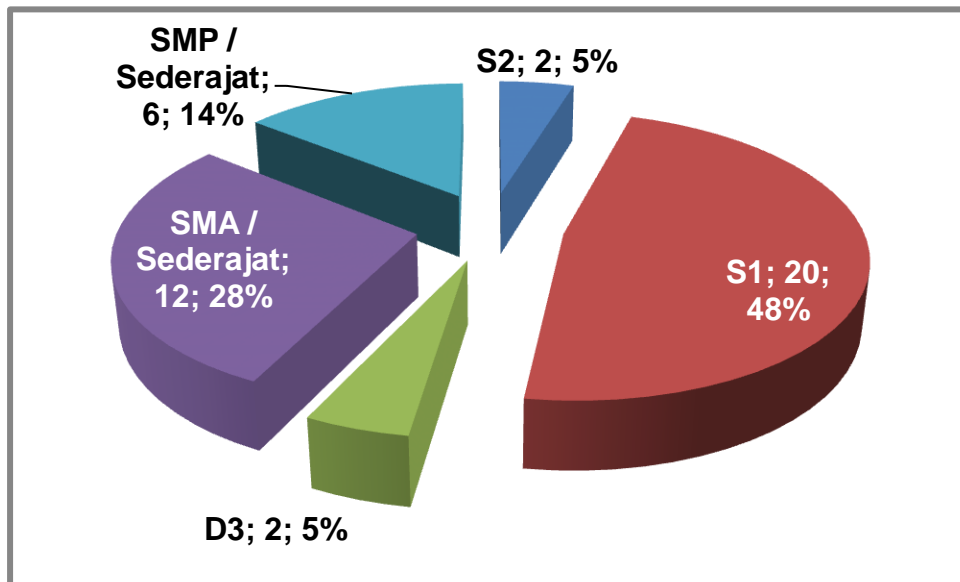
**Gambar 2.**  
**Jenis Pegawai Dinas LH Tahun 2017**

Berdasarkan urutan kepangkatan komposisi ASN Dinas LH Disajikan pada **Gambar 3.**



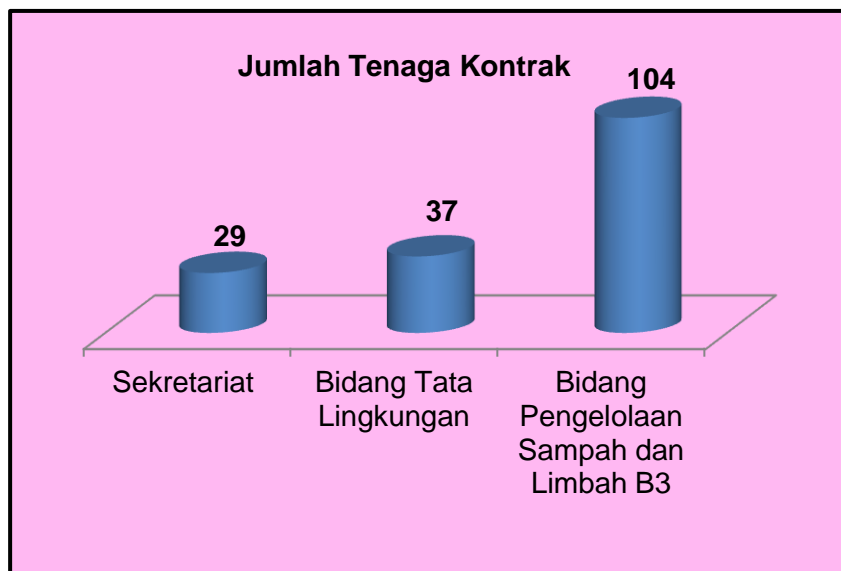
**Gambar 2.**  
**Komposisi ASN Dinas LH**  
**Berdasarkan urutan kepangkatan**

Sedangkan komposisi dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada **Gambar 4.**



**Gambar 4.**  
Komposisi ASN Dinas LH  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk Tenaga kontrak, tersebar pada Sekretariat dan 2 bidang, Sebaran tenaga kontrak disajikan Pada **Gambar 5**



**Gambar 5.**  
Jumlah Tenaga Kontrak Dinas LH Tahun 2017





### 1.2.2. Potensi Unggulan Internal dan Eksternal Dinas LH

Berdasarkan hasil inventarisasi menunjukkan beberapa Potensi Unggulan Internal dan Eksternal Dinas LH. Potensi tersebut disajikan pada Tabel Berikut.

**Tabel 1.1**  
**Potensi Unggulan Dinas LH**

No	Uraian	Potensi Unggulan		Keterangan
		Internal	Eksternal	
1	Sumber Daya Alam		Relatif masih Asri	
2	Hutan		Tutupan Hutan Masih Luas	
3	Sampah		Regulasi Yang Mendukung	



## BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS LH

### 2.1. VISI & MISI Dinas LH

#### 2.1.1. Visi Dinas LH

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 adalah:

**“Luwu Utara Lestari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam  
Dan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan “**

Pokok-Pokok Visi dari Renstra Tahun 2016-2021 DLH Kabupaten Luwu Utara terletak pada 3 (tiga) materi mendasar, yakni :

- a. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
- b. Terjaganya daya dukung dan daya Tampung LH
- c. Terlindunginya fungsi Lingkungan Hidup

#### 2.1.2. Misi Dinas LH

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- b. Mengembangkan Pelayanan Dan Sistem Informasi LH yang terintegrasi;
- c. Mengendalikan Dampak Pembangunan terhadap kelestarian fungsi LH;
- d. Mewujudkan Peran serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- e. Menegakkan Regulasi dan Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup

### 2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 2.2.1. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Pertama

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Pertama Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

**Tabel 2.1**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Pertama**  
**Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1 Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengelola LH	Meningkatkan kapasitas Aparat Pengelola LH	Mendorong Aparat Pengelola LH Untuk Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan serta Bimbingan Teknis
1.1.2 Meningkatkan Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Meningkatkan Kinerja Lembaga Dalam Perencanaan dan Evaluasi	Pengembangan instrumen pengelolaan LH
1.1.3 Meningkatkan Kapasitas Laboratorium LH & Unit Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Kapasitas Laboratorium LH	Pengembangan Lab. LH terakreditasi  Pengembangan Unit Pelayanan Pengelola Sampah

#### 2.2.2. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi kedua Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua**  
**Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2.1.1 Meningkatkan Kapasitas Penyebaran Informasi LH	Mengembangkan Sistem Informasi LH daerah yang Mudah diakses Publik	Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan data yang berkualitas.
2.1.2 Meningkatkan Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Bidang LH	Menciptakan Sistem Pelayanan Prima kepada Publik	Pengembangan SOP dan SPP yang berorientasi pada Publik

## 2.2.3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi ketiga Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga**  
**Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3.1.1 Terwujudnya Manajemen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Profesional	Meningkatkan pengelolaan sampah dan Limbah B3	Pengembangan upaya 3R  Pengembangan bank sampah dan Unit Pengomposan  Memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
3.1.2 Meningkatnya Kualitas LH	Penguatan sistem pemantauan kualitas Air	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan secara Komprehensif  Pengendalian Pencemaran Akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air  Penurunan beban pencemaran dari limbah domestik  Peningkatan mutu dan kelas air
	Penguatan sistem pemantauan kualitas Udara	Pemantauan kualitas udara ambien  Peningkatan Upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi
	Peningkatan tutupan lahan/hutan	Peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan  Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar  Pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3.1.3 Meningkatnya Proporsi RTH Publik Dalam wilayah Perkotaan ( <i>Urban Areal</i> )	Pemenuhan Kriteria RTH Publik Dalam Wilayah Perkotaan ( <i>urban Areal</i> )	Pembangunan RTH Publik di tiap Kecamatan Pemeliharaan RTH Publik secara Komprehensif
3.1.4 Meningkatnya Jumlah Koleksi Spesies Endemik terkategori Langka	Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.	Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati Melalui Penyusunan RIP Keanekaragaman hayati dan Profil Keanekaragaman Hayati Pengembangan Model Lahan Kehati Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati
3.2.1 Meningkatnya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.

#### 2.2.4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Keempat Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

**Tabel 2.4**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat**  
**Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4.1.1 Meningkatnya Role Model Sikap dan Perilaku hidup masyarakat yang Peduli terhadap Alam dan Lingkungan	Mewujudkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan LH dan SDA	Melaksanakan Inventarisasi Kearifan Lokal terkait dengan Pelestarian SDA dan LH
4.1.2 Meningkatnya Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan		Pembentukan Kader-kader Lingkungan  Menciptakan Mekanisme sistem insentif dan disinsentif Terhadap Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup  Peningkatan Edukasi dan Kampanye Peduli Lingkungan

#### 2.2.5. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Langkah–langkah yang diupayakan untuk mewujudkan Misi Kelima Renstra Tahun 2016-2021 Dinas LH Kab. Luwu Utara disajikan Pada Tabel Berikut.

**Tabel 2.5**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima**  
**Renstra Dinas LH Kabupaten Luwu Utara**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
5.1.1 Meningkatnya Upaya Pembuatan, Pelaksanaan serta Pembinaan Peraturan di bidang LH	Pemenuhan Kebutuhan Peraturan Terkait dengan Pengelolaan dan Pelestarian SDA dan LH	Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Merupakan Turunan peraturan di atasnya.
5.1.2 Meningkatnya Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi bagi Pemrakarsa	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang intensif pada sumber-sumber pencemar dan Pemrakarsa
5.1.3 Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	Meningkatkan Sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya.  Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa LH	Peningkatan Kerjasama dengan Stake Holder lainnya dalam implementasi Produk Hukum yang dibuat  Pengembangan Layanan Pengaduan

### 2.3. INDIKATOR RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara telah Menetapkan Visi Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal dengan salah satu misinya adalah misi ke-5 yang berbunyi **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan Sasaran Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dinas Lingkungan Hidup berperan utama dalam kontribusi merealisasikan Misi tersebut.

Merujuk pada Misi RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup akan berkontribusi besar dalam merealisasikan Misi Ke-5 yakni : **Mewujudkan Kelestarian LH dengan Sasaran Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan.**

Adapun Kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut diantaranya :

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 3) Pengendalian Perubahan Iklim.
- 4) Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan SDA dan LH.

Terdapat beberapa indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang dijadikan tolak ukur dalam merealisasikan misi tersebut diatas, indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja Dinas LH Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran**  
**RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	33,33 %	40,00	48,00	56,00	64,00	71,00	75,00	75,00
2	Penegakan hukum lingkungan	0 %	2	4	6	8	9	10	10

Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas LH Tahun 2017, terdapat 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja beririsan dengan Indikator kinerja Sasaran RPJMD. Indikator tersebut diuraikan dibawah ini.

### 2.3.1 Sasaran Pertama

Sasaran Pertama Renstra yang beririsan dengan Indikator Kinerja RPJMD adalah Sasaran 14 dalam Penetapan Kinerja yakni Meningkatnya Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan.

**Tabel 2.7**  
**Kontribusi Indikator Kinerja Pertama Renstra Terhadap Kemajuan Indikator RPJMD**

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Satuan	Tahun 2016		Tingkat Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	Kemajuan Kinerja RPJMD (Tahun 2021)		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan RPJMD
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10 / 9
Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	Persen	40.00	4	8.93%	48.00	17.86	37.20%	75	17.86	23.81%

Tabel diatas menunjukkan Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD pada tahun 2017 mencapai angka 23.81%, sementara itu capaian realisasi tahun 2017 (37,20%) lebih tinggi persentasenya daripada Tahun 2016 (8,93%).

- Beberapa penjelasan terkait Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD diuraikan sebagai berikut :
  - ✓ Hasil Pengukuran didasarkan pada Asumsi bahwa 75% Capaian kemajuan RPJMD pada Tahun 2021 equal dengan 21 Usaha/kegiatan yang diawasi pengelolaan lingkungannya.
  - ✓ Pada tahun 2017 Dinas LH telah melakukan Pengawasan terhadap 5 Lokus Kegiatan.
  - ✓ Hasil pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan menunjukkan bahwa rata-rata Kegiatan tersebut **“BELUM TAAT”** pada peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.



### 2.3.2 Sasaran Kedua

Sasaran kedua Renstra yang beririsan dengan Indikator Kinerja RPJMD adalah Sasaran 15 dalam Penetapan Kinerja yakni Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Tabel 2.8**  
**Kontribusi Indikator Kinerja Kedua Renstra Terhadap Kemajuan Indikator RPJMD**

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Satuan	Tahun 2016		Tingkat Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	Kemajuan Kinerja RPJMD (Tahun 2021)		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan RPJMD
1	2	3	4	$5 = 4 / 3$	6	7	$8 = 7 / 6$	9	10	$11 = 10 / 9$
Penegakan hukum lingkungan	Persen	2	0.40	20.00%	4	2	50.00%	10	2	20.00%

Tabel diatas menunjukkan Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD pada tahun 2017 mencapai angka 20.00%, sementara itu capaian realisasi tahun 2017 (50,00%) lebih tinggi persentasenya daripada Tahun 2016 (20,00%).

- Beberapa penjelasan terkait Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD diuraikan sebagai berikut :
  - ✓ Hasil Pengukuran didasarkan pada Asumsi bahwa 10% Capaian kemajuan RPJMD pada Tahun 2021 adalah equal dengan 25 Rekomendasi tindak lanjut Penanganan aduan dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
  - ✓ Pada tahun 2017 Dinas LH telah menerbitkan 5 rekomendasi tindak lanjut sebagaimana telah dibahas pada sasaran 15 Penetapan Kinerja dinas LH Tahun 2017.
  - ✓ Rekomendasi diantaranya Dugaan Pencemaran usaha peternakan ayam, Dugaan Kerusakan Jalan akibat Kendaraan pengangkut material Tambang galian C, Dugaan Pencemaran Sungai Masamba Oleh sampah masyarakat, Dugaan Pencemaran Limbah usaha tahu tempe, Dugaan Pencemaran Limbah Medis.

## **2.4. PRIORITAS KEGIATAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 melaksanakan 11 Program dan 34 kegiatan. Program tersebut dibedakan menjadi Program Penunjang dan Program Prioritas dimana terdapat 6 Program Penunjang dan 5 Program Prioritas.

Program Penunjang tersebut adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Prioritas diantaranya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi SDA, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



#### **3.1. Ringkasan Urusan Desentralisasi**

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup Termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdapat 11 Sub Bidang Lingkungan Hidup Yang Menjadi Kewenangan kabupaten, diantaranya :

1. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Persampahan

#### **3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Pada tahun 2017 telah melaksanakan 9 Sub Bidang Urusan yang menghasilkan beberapa output kegiatan, Tabel 3.1 menyajikan Sub Bidang yang dilaksanakan serta Outputnya:

**Tabel 3.1**  
**Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas LH Tahun 2017**

NO.	SUB BIDANG URUSAN	Uraian Kegiatan	OUTPUT	KET.
1	Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH : 1 Dokumen	
2	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	1 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Kawasan : 6 Titik - Pemukiman, Industri atau Sumber Mata Air yang di informasikan Status Mutu Air  Jumlah Kawasan : 3 Titik - Pemukiman, Industri Dan Sarana Transportasi yang di informasikan Status Mutu Udara  Jumlah Lokasi : 10 Titik - Lahan/Tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan status Mutunya Jumlah Lokasi Pesisir dan : 1 Titik - Laut Yang di informasikan Status Mutunya	
		2 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah IPAL Skala Komunal dan Skala Perkotaan serta Skala Usaha Kecil Yang Terbangun dan dipelihara : 3 Unit	
		3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dipulihkan kualitas Lhnya : 12 Titik	
		4 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah lokasi yang dikonservasi kualitas Lhnya : 2 Titik	
		5 Penyusunan Kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah RanPerbup yang disediakan : 4 Dokumen	
3	Bidang Keanekaragaman hayati	1 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Spesies Endemik Luwu Utara yang terdata : 2 Dokumen	
4	Bidang B3 dan Limbah B3	1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3 : 0 Pemrakarsa	

NO.	SUB BIDANG URUSAN	Uraian Kegiatan	OUTPUT	KET.
5	Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Yang diawasi Pelaksanaannya : 3 Dokumen	
6	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap PPA dan PPU : 2 Pemrakarsa Jumlah Kader Lingkungan : 25 Orang Jumlah Klp Masyarakat Peduli Lingkungan yang bermitra dan berkejasama (LSM/Yayasan Pemerhati Lingkungan, KPA, Korpala, Sispala dll) : 4 Lembaga	
7	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Inovator Lingkungan yang difasilitasi : 0 Inovator Jumlah Sekolah / Saka Kalpataru yang dibina : 4 Sekolah	
8	Pengaduan Lingkungan Hidup	1 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup : 5 Aduan	
9	Persampahan	1 Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Sapras yang terpelihara : 587 Unit Jumlah Petugas Pengelola Sampah : 120 Orang Jumlah UKM Bank Sampah Aktif : 10 Titik	

Sub Bidang Urusan KLHS Dan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH belum dilaksanakan pada Tahun 2017.

### 3.3. Anggaran Belanja dan Realisasi Pelaksanaan Urusan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017 realisasi serapan anggaran Belanja Langsung dinas LH menyentuh nominal **Rp. 6,028,588,467 (Enam Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

Ditinjau dari segi komponennya, Serapan anggaran Belanja Langsung dinas LH terbagi kedalam 3 Komponen Belanja Yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja Modal. Tabel 3.2 menyajikan realisasi serapan anggaran belanja per komponen tersebut.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Serapan Belanja Langsung Dinas LH**

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Belanja Pegawai	Rp 358,870,000	Rp 358,870,000	100.00%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5,145,534,300	Rp 5,099,807,851	99.11%
3	Belanja Modal	Rp 588,182,816	Rp 569,910,616	96.89%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp 6,092,587,116</b>	<b>Rp 6,028,588,467</b>	<b>98.95%</b>

Tabel Diatas menunjukkan Tingkat Efisiensi Serapan yang paling tinggi adalah Belan Pegawai dengan nilai 100%, kemudian disusul Oleh Belanja Barang dan Jasa dengan nilai 99.11% serta terakhir adalah belanja Modal dengan Tingkat Efisiensi Serapan mencapai 96.89%.

Selanjutnya Tingkat efisiensi Serapan anggaran berdasarkan Program dan kegiatan Dinas LH Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Serapan Anggaran Berdasarkan Program / kegiatan**

PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2017		
		Pagu Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2017	Persentase
1		3	4	5 = 4 / 3
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp 6,092,587,116</b>	<b>Rp 6,028,588,467</b>	<b>98.95%</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 625,477,000</b>	<b>Rp 618,778,762</b>	<b>98.93%</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 400,000	Rp 198,000	49.50%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 31,000,000	Rp 29,406,471	94.86%
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 10,277,000	Rp 9,062,400	88.18%

PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2017		
		Pagu Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2017	Persentase
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 24,000,000	Rp 22,000,000	91.67%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 9,000,000	Rp 7,320,000	81.33%
	6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 260,000,000	Rp 259,999,391	100.00%
	7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & Asset	Rp 290,800,000	Rp 290,792,500	100.00%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 204,573,000</b>	<b>Rp 201,721,004</b>	<b>98.61%</b>
	1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp 74,250,000	Rp 71,650,000	96.50%
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 65,400,000	Rp 65,177,000	99.66%
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 45,923,000	Rp 45,895,000	99.94%
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 19,000,000	Rp 18,999,004	99.99%
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp 9,900,000</b>	<b>Rp 9,900,000</b>	
	Pengadaan Mesin Absensi Kantor	Rp 9,900,000	Rp 9,900,000	100%
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 65,300,000</b>	<b>Rp 65,000,000</b>	<b>99.54%</b>
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 65,300,000	Rp 65,000,000	99.54%
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 23,000,000</b>	<b>Rp 23,000,000</b>	<b>100.00%</b>
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 23,000,000	Rp 23,000,000	100.00%
<b>6.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 44,600,000</b>	<b>Rp 44,570,000</b>	<b>99.93%</b>
	1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan Pihak Lainnya	Rp 44,600,000	Rp 44,570,000	99.93%

PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2017		
		Pagu Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2017	Persentase
<b>7.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Rp 2,734,885,500</b>	<b>Rp 2,714,371,493</b>	<b>99.25%</b>
	1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp 2,642,894,000	Rp 2,642,379,993	99.98%
	2. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Rp 7,091,500	Rp 7,091,500	100.00%
	3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 84,900,000	Rp 64,900,000	76.44%
<b>8.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp 953,053,616</b>	<b>Rp 924,776,043</b>	<b>97.03%</b>
	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp 182,000,000	Rp 180,866,677	99.38%
	2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp 40,000,000	Rp 39,920,000	99.80%
	3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rp 57,768,800	Rp 57,679,800	99.85%
	4. Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp 38,252,000	Rp 38,251,000	100.00%
	5. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Rp 264,032,816	Rp 252,737,366	95.72%
	6. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 24,000,000	Rp 23,950,000	99.79%
	7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH	Rp 347,000,000	Rp 331,371,200	95.50%
<b>9.</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>Rp 484,985,000</b>	<b>Rp 480,241,250</b>	<b>99.02%</b>
	1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Rp 240,000,000	Rp 235,623,250	98.18%
	2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Rp 49,650,000	Rp 49,475,000	99.65%
	3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Rp 51,000,000	Rp 50,908,000	99.82%
	4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Rp 34,235,000	Rp 34,210,000	99.93%
	5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Rp 110,100,000	Rp 110,025,000	99.93%



PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2017		
		Pagu Anggaran 2017	Realisasi Anggaran 2017	Persentase
<b>10.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp 365,063,000</b>	<b>Rp 364,846,500</b>	<b>99.94%</b>
	1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp 49,300,000	Rp 49,275,000	99.95%
	2. Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Rp 275,453,000	Rp 275,270,000	99.93%
	3. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Rp 40,310,000	Rp 40,301,500	99.98%
<b>11</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Rp 581,750,000</b>	<b>Rp 581,383,415</b>	<b>99.94%</b>
	1. Pemeliharaan RTH	Rp 581,750,000	Rp 581,383,415	99.94%

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 kegiatan yang Tingkat efisiensi serapan anggarannya mencapai 100%, antara lain :

1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
2. Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Kantor
5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
6. Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & Asset

Sementara itu kegiatan yang paling rendah Tingkat Efisiensi Serapan anggarannya adalah Kegiatan penyediaan Jasa Surat menyurat dengan Tingkat efisiensi serapan 49,50% dan kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan Tingkat efisiensi serapan 76,44%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu Utara menangani Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2017 telah melaksanakan 9 Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup.

Pencapaian tujuan dan sasaran telah diupayakan secara optimal dengan hasil capaian kinerja yang mengesankan, Hasil-hasil tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan, meminimalkan ancaman dan hambatan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang didukung input pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2017.

Sejalan dengan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan diakuinya terdapat hasil yang tidak optimal dalam mengelola kegiatan baik kuantitas maupun kualitas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Masamba, Februari 2018  
Kepala Dinas LH

**Ir. BURAMIN DANNU**

Pkt. : Pembina Utama Muda

Nip : 19600412 198903 010